

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Hakim, 2006, Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung, Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, Yogyakarta.
- Anhar Gonggong, 2001, Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme, Merdia presindo, yogyakarta
- C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2004, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta.
- Georg Sorensen, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi-Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamdan Zoelva, 2005, "Impeachment Presiden" Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945", konstitusi Pres, Jakarta
- Jimliy Assiddiqie, 2004, "format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, UII Pres, Yogyakarta
- Jimly Asshididdiqie, 2007, "Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi" PT Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Kunthi Dyah Wardani, 2007, Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta,
- Masykuri Abdillah, 2004, Demokrasi dipersimpangan Makna-Respons Intelektual Muslim terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), Tiara Wacana, Yogyakarta
- Miriam Budiarto, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhari, 2003, Negara Hukum-Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, Prenada Media, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia-Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta.

Moh. Mahfud MD, 2006, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Jakarta, 1993, hlm 82. lihat juga Am'mar A.A, kedudukan Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Skripsi, FH-UMY, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta

Nukthoh Arfawi Kurde, 2005, *Telaah kritis teori negara hukum-konsitusi dan demokrasi dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UUD-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Oemar Seno Adji, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta,

Nurwijayanti Septi dan Prasetyoningsih Nanik, 2007, *Politik Ketatanegaraan*

Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

—————, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*

—————, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

—————, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

—————, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)

—————, TAP MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan

—————, TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga Tertinggi Negara

_____, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Media Elektronik

www. Google.com. Pan Muhammad Fais, makalah sistem Perubahan Ketatanegaraan RI, tanggal.10/05/2011, 17.28 WIB

http/www. Saepudin.wordpress.com,” Mekanisme Pemakzulan presiden dan wakil presiden menurut UDD 1945, tanggal 10/05/2011, 17.28 WIB